

Jejaring Kebijakan dalam Menghadapi Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Modern di Kota Bandung

Rizky Ilhami

Universitas Padjajaran

rizkyilhami@unpad.ac.id

Abstract; This study aims to analyze policy networks in addressing the challenges of modern governance in Bandung City. The complexity of urban issues and the demand for transparent, participatory, and adaptive governance have encouraged local governments to involve various non-governmental actors in the public policy process. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and observation of actors involved in policy networks within the Bandung City Government. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model. The results show that the policy network in Bandung City has been formed through collaboration between the government, the private sector, academics, and the community. However, the effectiveness of this network still faces various challenges, such as weak coordination between actors, government dominance in decision-making, unclear division of roles and accountability, and low levels of trust and long-term commitment. This study concludes that strengthening the policy network through improved coordination, institutional capacity, utilization of digital technology, and community participation is key to realizing collaborative and sustainable modern governance in Bandung City.

Keywords: policy network, modern governance, local government, Bandung City

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jejaring kebijakan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung. Kompleksitas permasalahan perkotaan serta tuntutan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan adaptif mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai aktor non-pemerintah dalam proses kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring kebijakan di Kota Bandung telah terbentuk melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Namun, efektivitas jejaring tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antaraktor, dominasi pemerintah dalam pengambilan keputusan, belum jelasnya pembagian peran dan akuntabilitas, serta rendahnya tingkat kepercayaan dan komitmen jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan jejaring kebijakan melalui peningkatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern yang kolaboratif dan berkelanjutan di Kota Bandung.

Kata kunci: jejaring kebijakan, tata kelola pemerintahan modern, pemerintahan daerah, Kota Bandung

1. PENDAHULUAN

Evolusi tata kelola modern memerlukan pergeseran yang signifikan menuju pendekatan kolaboratif, adaptif, dan partisipatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Pemerintah harus melibatkan beragam pemangku kepentingan, termasuk warga negara, bisnis, dan masyarakat sipil, untuk secara efektif mengatasi isu-isu kompleks seperti urbanisasi dan digitalisasi layanan publik (Hamliri et al., 2025) . Kerangka kerja tata kelola kolaboratif ini memungkinkan pembentukan jaringan kebijakan, yang penting untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai aktor, sehingga meningkatkan daya tanggap dan efektivitas kebijakan (Carneiro Neto et al., 2019) . Selain itu, meningkatnya tuntutan transparansi dan

akuntabilitas memaksa pemerintah untuk mengadopsi praktik yang memastikan warga negara dapat meminta pertanggungjawaban mereka, menumbuhkan kepercayaan dan kredibilitas (Král'ová, 2008).

Jaringan kebijakan memainkan peran penting dalam tata kelola modern dengan membina hubungan interaktif di antara beragam aktor, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Jaringan ini memfasilitasi tata kelola kolaboratif, yang menekankan kerja sama untuk mengatasi masalah publik yang kompleks secara efektif (Zuhdi et al., 2024). Dengan mengintegrasikan sumber daya, pengetahuan, dan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, jaringan kebijakan meningkatkan kapasitas tata kelola, memungkinkan pemerintah untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang lebih efektif (Saber & Gomaa, 2020). Selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan dalam jaringan ini memastikan bahwa kebutuhan dan perspektif semua pihak dipertimbangkan, yang mengarah ke kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif (Fleury, 2005). Penggunaan strategis jaringan kebijakan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik, karena memungkinkan pendekatan yang lebih adaptif dan banyak akal untuk tata kelola. Kerangka kerja kolaboratif ini sangat penting untuk mengatasi tantangan yang semakin rumit yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Kota Bandung mencontohkan lingkungan perkotaan yang dinamis yang dibentuk oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, ekonomi kreatif yang berkembang, dan implementasi inisiatif kota pintar. Faktor-faktor ini menciptakan laboratorium kebijakan publik yang unik untuk mempelajari tata kelola perkotaan. Pemerintah Kota Bandung telah memulai program kolaboratif yang melibatkan pelaku non-pemerintah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan, yang sangat penting untuk mengatasi tantangan kompleks kota (Aswin et al., 2022). Namun, efektivitas jaringan kebijakan ini terhambat oleh tantangan seperti kepentingan yang berbeda di antara para pemangku kepentingan, koordinasi terbatas, dan mekanisme tata kelola kolaboratif yang kurang optimal (Pujianti et al., 2023). Selain itu, perencanaan kota yang efektif sangat penting untuk mengelola dinamika ini dan memastikan pembangunan berkelanjutan, terutama karena teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan kehidupan perkotaan melalui inisiatif kota pintar (Sukandi, A. 2024).

Di Kota Bandung, tantangan pemerintahan modern terkait erat dengan kebutuhan adaptasi yang efektif terhadap perubahan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan promosi partisipasi masyarakat. Manajemen jaringan kebijakan yang kuat sangat penting untuk menavigasi tantangan ini, karena mendorong kolaborasi di antara para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat, sehingga membangun

kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi yang efektif (Zulmasyhur, 2025) . Tanpa manajemen seperti itu, upaya untuk menerapkan tata kelola modern dapat menghadapi hambatan struktural dan budaya yang signifikan, merusak potensi peningkatan layanan publik dan keterlibatan warga (Nainggolan & Ivanna, 2024) . Selain itu, penggambaran peran yang jelas dalam jaringan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktor berkontribusi secara efektif untuk proses tata kelola, yang pada akhirnya mengarah pada pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel yang memenuhi kebutuhan warganya .

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana jejaring kebijakan dibangun dan dikelola dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran jejaring kebijakan dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah, serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh aktor pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan publik tidak hanya mencakup proses perumusan, tetapi juga implementasi dan evaluasi yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, kebijakan publik semakin dipengaruhi oleh dinamika lingkungan eksternal dan keterlibatan aktor non-pemerintah.

Jejaring Kebijakan (Policy Network)

Jejaring kebijakan (*policy network*) merupakan konsep yang menjelaskan pola hubungan dan interaksi antaraktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Rhodes mendefinisikan jejaring kebijakan sebagai seperangkat hubungan yang relatif stabil antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yang saling bergantung dalam proses pembuatan kebijakan. Jejaring ini terbentuk karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga membutuhkan dukungan aktor lain.

Marsh dan Smith menekankan bahwa jejaring kebijakan tidak hanya mencerminkan struktur hubungan, tetapi juga proses interaksi yang dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan institusi. Dalam jejaring kebijakan, aktor-aktor memiliki peran yang berbeda, seperti pembuat kebijakan, pelaksana, fasilitator, maupun pengawas.

Tata Kelola Pemerintahan Modern

Tata kelola pemerintahan modern merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Konsep ini berkembang dari paradigma *New Public Governance* yang menempatkan pemerintah sebagai salah satu aktor dalam jaringan tata kelola, bukan sebagai aktor tunggal.

Osborne menjelaskan bahwa tata kelola pemerintahan modern berfokus pada kolaborasi lintas sektor dan pengelolaan jaringan organisasi untuk mencapai tujuan publik. Sementara itu, UNDP menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus mampu menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika jejaring kebijakan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, dengan fokus pada lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta aktor non-pemerintah yang terlibat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Waktu penelitian berlangsung selama 4 bulan, yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Fokus penelitian ini adalah jejaring kebijakan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.

Hasil Penelitian

Secara empiris, jejaring kebijakan di Kota Bandung melibatkan banyak aktor lintas sektor, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil. Namun, keterlibatan multiaktor tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan mekanisme koordinasi yang efektif. Perbedaan struktur organisasi, kepentingan, dan pola kerja sering menimbulkan tumpang tindih peran serta lemahnya sinkronisasi program kebijakan.

Meskipun jejaring kebijakan telah dibentuk, praktik di lapangan masih menunjukkan dominasi pemerintah sebagai aktor utama. Aktor non-pemerintah cenderung berperan sebagai pelaksana atau pendukung program, bukan sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan. Kondisi ini menyebabkan jejaring kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan modern.

Permasalahan empiris lain yang muncul adalah belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antaraktor jejaring kebijakan. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas, ketergantungan berlebihan pada aktor tertentu, serta sulitnya melakukan evaluasi kinerja jejaring kebijakan secara menyeluruh.

Dalam praktik jejaring kebijakan di Kota Bandung, tingkat kepercayaan (*trust*) antaraktor masih menjadi tantangan. Perbedaan kepentingan, pengalaman kolaborasi yang tidak konsisten, serta minimnya komunikasi berkelanjutan menyebabkan komitmen aktor dalam jejaring kebijakan bersifat temporer dan berbasis proyek, bukan kemitraan jangka panjang.

Sebagai kota yang mengusung konsep *smart city*, Kota Bandung menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam tata kelola pemerintahan. Secara empiris, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, integrasi data antarinstansi, serta kolaborasi digital dengan aktor non-pemerintah. Hal ini berdampak pada efektivitas jejaring kebijakan berbasis digital.

Walaupun berbagai kanal partisipasi publik telah disediakan, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan masih bersifat konsultatif dan belum sampai pada tahap *co-creation*. Partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap implementasi, sementara keterlibatan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih relatif rendah.

Permasalahan empiris lainnya adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola jejaring kebijakan. Hal ini mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kolaboratif, lemahnya kepemimpinan jejaring, serta belum optimalnya regulasi yang menata kerja sama lintas aktor secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, mekanisme akuntabilitas dan evaluasi jejaring kebijakan di Kota Bandung belum berjalan optimal. Indikator keberhasilan kolaborasi masih berfokus pada output program, belum pada kualitas proses jejaring dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan modern.

Pembahasan

Upaya mengatasi permasalahan jejaring kebijakan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan jejaring kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dipahami sebagai proses institusional yang melibatkan perubahan struktur, pola interaksi, serta budaya kerja antaraktor kebijakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jejaring kebijakan di Kota Bandung menghadapi tantangan serius dalam aspek koordinasi antaraktor. Keterlibatan banyak aktor lintas sektor memang memperkaya perspektif kebijakan, namun pada saat yang sama meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Secara empiris, belum adanya mekanisme koordinasi yang baku menyebabkan tumpang tindih peran, lemahnya sinkronisasi program, serta inefisiensi pelaksanaan kebijakan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rhodes dan Marsh & Smith yang menegaskan bahwa jejaring kebijakan membutuhkan aturan main dan struktur koordinasi yang jelas agar interaksi antaraktor dapat berjalan efektif. Tanpa koordinasi yang kuat, jejaring kebijakan berpotensi menjadi forum diskusi tanpa dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan. Pertama, penguatan mekanisme koordinasi menjadi prasyarat utama dalam membangun jejaring kebijakan yang efektif.

Pemerintah Kota Bandung perlu mengembangkan sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan melalui pembentukan forum jejaring kebijakan lintas sektor. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang komunikasi, tetapi juga sebagai wadah perumusan agenda bersama, sinkronisasi program, dan penyelesaian konflik kepentingan antaraktor. Keberadaan koordinator jejaring yang memiliki kapasitas manajerial dan kewenangan yang jelas akan membantu memastikan keberlangsungan interaksi dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Meskipun konsep jejaring kebijakan menekankan kesetaraan aktor, praktik di Kota Bandung masih menunjukkan dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Aktor non-pemerintah lebih banyak ditempatkan sebagai pelaksana program dibandingkan mitra strategis. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma tata kelola masih cenderung hierarkis dan belum sepenuhnya bergeser ke arah *collaborative governance*.

Menurut Ansell dan Gash, kolaborasi yang efektif menuntut adanya distribusi kekuasaan dan ruang deliberasi yang setara antaraktor. Dominasi satu aktor berpotensi melemahkan komitmen dan rasa kepemilikan bersama terhadap kebijakan. Kedua, pergeseran paradigma dari tata kelola hierarkis menuju tata kelola kolaboratif harus diikuti dengan penguatan kesetaraan peran antaraktor jejaring. Pemerintah daerah perlu membuka ruang

partisipasi yang lebih luas bagi aktor non-pemerintah sejak tahap perencanaan kebijakan. Pelibatan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai mitra strategis akan meningkatkan kualitas kebijakan serta memperkuat rasa kepemilikan bersama terhadap hasil kebijakan. Dengan demikian, jejaring kebijakan tidak hanya menjadi alat implementasi, tetapi juga arena deliberasi dan pengambilan keputusan bersama.

Permasalahan empiris lainnya adalah belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab antaraktor dalam jejaring kebijakan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya akuntabilitas serta sulitnya melakukan evaluasi kinerja jejaring. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada pemerintah, tetapi juga kepada seluruh aktor jejaring. Osborne menekankan bahwa tata kelola berbasis jaringan membutuhkan kejelasan peran agar setiap aktor dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

kejelasan peran dan akuntabilitas dalam jejaring kebijakan perlu diperkuat melalui penataan kelembagaan yang lebih sistematis. Pemerintah Kota Bandung perlu menyusun pembagian peran yang jelas antaraktor jejaring, disertai dengan mekanisme evaluasi kinerja yang menilai tidak hanya capaian program, tetapi juga kualitas proses kolaborasi. Akuntabilitas kolektif ini penting untuk memastikan bahwa setiap aktor bertanggung jawab terhadap kontribusinya dalam jejaring kebijakan dan tujuan tata kelola pemerintahan modern.

Kepercayaan (*trust*) merupakan fondasi utama dalam jejaring kebijakan. Temuan empiris menunjukkan bahwa hubungan antaraktor di Kota Bandung masih bersifat pragmatis dan berbasis proyek jangka pendek. Minimnya komunikasi berkelanjutan dan pengalaman kolaborasi yang tidak konsisten menyebabkan rendahnya komitmen jangka panjang. Dalam perspektif *collaborative governance*, rendahnya kepercayaan akan menghambat proses deliberasi dan memperlemah keberlanjutan jejaring kebijakan.

pembangunan kepercayaan dan komitmen jangka panjang antaraktor merupakan fondasi keberhasilan jejaring kebijakan. Pemerintah daerah perlu mendorong interaksi yang berkelanjutan melalui dialog rutin, komunikasi yang transparan, serta pengelolaan konflik secara terbuka. Hubungan kolaboratif yang dilandasi kepercayaan akan mendorong aktor jejaring untuk berkontribusi secara lebih aktif dan berkelanjutan, sehingga jejaring kebijakan tidak bersifat temporer atau berbasis proyek semata.

Sebagai kota yang mengusung konsep *smart city*, Kota Bandung menghadapi tantangan dalam integrasi teknologi ke dalam jejaring kebijakan. Pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mendukung kolaborasi antaraktor akibat keterbatasan kapasitas SDM, integrasi data yang belum optimal, serta kesenjangan literasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa

digitalisasi kebijakan tidak cukup hanya dengan penyediaan teknologi, tetapi juga memerlukan kesiapan kelembagaan dan aktor jejaring.

pemanfaatan teknologi informasi perlu diintegrasikan secara strategis dalam pengelolaan jejaring kebijakan. Digitalisasi tata kelola pemerintahan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan efisiensi administrasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kolaborasi antaraktor. Pengembangan platform kolaborasi digital yang terintegrasi, disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akan memperkuat jejaring kebijakan berbasis teknologi dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan modern yang adaptif.

Partisipasi masyarakat dalam jejaring kebijakan di Kota Bandung masih berada pada level konsultatif. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan sebagai co-creator kebijakan. Kondisi ini membatasi potensi inovasi dan legitimasi kebijakan publik. Menurut prinsip tata kelola pemerintahan modern, partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) menjadi kunci keberhasilan kebijakan publik.

Keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola jejaring kebijakan menjadi tantangan struktural. Keterampilan kolaboratif aparatur, kepemimpinan jejaring, dan dukungan regulasi masih perlu ditingkatkan agar jejaring kebijakan dapat berfungsi optimal. Selanjutnya, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat jejaring kebijakan. Pemerintah Kota Bandung perlu mendorong model partisipasi yang lebih bermakna dengan melibatkan masyarakat sebagai co-creator kebijakan. Pelibatan komunitas lokal dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan akan meningkatkan legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah menjadi faktor penentu keberlanjutan jejaring kebijakan. Peningkatan kompetensi aparatur dalam manajemen jejaring, kepemimpinan kolaboratif, serta pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan modern perlu menjadi agenda strategis. Dukungan regulasi yang adaptif dan berpihak pada kolaborasi lintas sektor akan memperkuat posisi jejaring kebijakan sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa jejaring kebijakan memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern di Kota Bandung. Dalam konteks pemerintahan daerah yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan publik, keterlibatan

berbagai aktor lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Jejaring kebijakan di Kota Bandung telah terbentuk dan dijalankan melalui berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, komunitas masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jejaring kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antaraktor, dominasi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan, belum jelasnya pembagian peran dan akuntabilitas, serta rendahnya tingkat kepercayaan dan komitmen jangka panjang antaraktor jejaring. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola pemerintahan di Kota Bandung masih berada dalam fase transisi dari paradigma hierarkis menuju tata kelola kolaboratif yang sesungguhnya. Selain itu, tantangan tata kelola pemerintahan modern juga tercermin dalam keterbatasan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital yang belum terintegrasi secara optimal, serta partisipasi masyarakat yang masih bersifat konsultatif. Meskipun Kota Bandung telah mengadopsi berbagai inisiatif berbasis *smart city*, implementasinya dalam mendukung jejaring kebijakan masih menghadapi kendala struktural dan kultural. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan jejaring kebijakan memerlukan penataan kelembagaan yang lebih sistematis, penguatan koordinasi dan komunikasi antaraktor, serta pergeseran paradigma menuju tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, inklusif, dan adaptif. Dengan pengelolaan jejaring kebijakan yang efektif, pemerintah daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami dinamika jejaring kebijakan pada level pemerintahan daerah serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Bandung dalam merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan modern yang berbasis kolaborasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, A., Ariesmansyah, A., & Indrianie, M. (2022). Collaborative Governance Model in the Development Center of Economic Empowerment and Community Creativity in Bandung City. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(5), 1189–1208. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i5.1071>
- Carneiro Neto, J. A., Guedes, D. R., do Nascimento, D. A., & Ibiapina de Sousa, H. P. A. (2019). Governança Pública no Contexto de Implementação das Políticas Públicas. *Razón y Palabra*, 23(104), 459–478. <https://archivos.juridicas.profeco.unam.revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/1363>

- Fleury, S. (2005). *Redes de políticas: novos desafios para a gestão pública*. 7(1). <https://doi.org/10.20946/RAD.V7I1.671>
- Hamliri, M., Youssef, S., & ERRACHIDI, A. (2025). Les nouvelles dynamiques de gouvernance publique en quête d'un modèle plus inclusif et durable. *IJDAM - International Journal of Digitalization and Applied Management.*, 2(2), 33–42. <https://doi.org/10.23882/ijdam.25202>
- Ilhami, R. (2023). *Policy Network Actors as Units of Public Policy Analysis*. 1(02), 103–111. <https://doi.org/10.58471/ju-sosak.v1i02.288>
- Ilhami, R. (2023). Strengthening Policy Networks to Create Effective Public Policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v2i3.143>
- Král'ová, L. (2008). *Policy Networks and the Problem of Governance in the Process of Public Policy Making in the Postmodern Democratic Society, particularly in Slovakia*. 3, 43–57. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=5873>
- Marsh, D., & Stoker, G. (2019). *Teori dan metode dalam ilmu politik*. Nusamedia.
- Nainggolan, J. A., & Ivanna, J. (2024). Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Proses Politik dan Pemerintahan di Bandung. *Journal on Education*, 6(4), 19208–19216. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5921>
- Pujianti, F., Muhtar, E. A., & Setiawan, T. (2023). Jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan kota layak anak (kla) melalui perogram perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di kota bandung. *Jurnal Administrasi Negara: JANE*, 14(2), 606. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45112>
- Rhodes, R. A. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Saber, H., & Gomaa, S. S. (2020). *Policy networks as a unit of analysis of public policies a case study of the social and health insurance policy network in Egypt (2015–2019)*. <https://doi.org/10.1108/REPS-09-2019-0130>
- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang city within the framework Rebana triangle economic region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68-83.
- Zuhdi, S., Rusli, B., Buchari, R. A., Sugandi, Y. S., & Suryana, D. (2024). Policy Network in the Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Program in Pekan Baru City, Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(8), 3175–3187. <https://doi.org/10.18280/ijsdp.190830>
- Zulmasyhur, Z. (2025). The Public Services Transformation in Enhancing Communities Welfare in Bandung City. *Public Works Management & Policy*. <https://doi.org/10.1177/1087724x251329076>